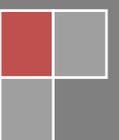




**RENCANA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2022**

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN  
ANAK KOTA SAMARINDA





## KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2022 merupakan penyusunan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilandasi Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang berdasarkan prestasi kerja.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi ke depan yang akan dicapai, upaya yang harus dilakukan dan kegiatan sebagai tindakan nyata pencapaian tujuan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Samarinda. Hal ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas bagi setiap stakeholder dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam memenuhi hasil akhir yang akandicapai dalam kurun waku satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026, sehingga sasaran utama penyusunan Renja ini sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Disamping itu juga mengacu pada Permendagri Nomor 13 tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur urusan wajib dan urusan pilihan instansi Pemerintah lingkup Departemen Dalam Negeri dan Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi



pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Perubahan RPJMD Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Perubahan RPJMD dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunannya dilakukan melalui tahapan perubahan yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk perencanaan yang realistis dan dapat dilaksanakan, yang disertai dengan masukan dari berbagai pihak.

Namun demikian kami menyadari dalam penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami berharap bantuan semua pihak untuk memberikan data dan informasi yang lebih tepat dan akurat untuk penyusunan rencana selanjutnya.

Akhirulakhir, bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta untuk lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak. di Kota Samarinda serta demi terwujudnya Kota Samarinda yang sejahtera melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu kerjasama dari semua pihak.

Semoga Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini berguna bagi pembangunan di Kota Samarinda pada umumnya dan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada khususnya.

Samarinda, Januari 2022

Kepala,

**H. Fitermen, SH.MM**  
**NIP. 19621231 198603 1 206**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II EVALUASI RENJA PD TAHUN 2021</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra DP2PA .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DP2PA .....	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.....	36
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	46
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DP2PA .....	52
3.3 Program dan Kegiatan .....	53
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DP2PA</b>	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan DP2PA .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	57



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 2.1</b> Tabel Evaluasi Hasil Renja - PD DP2PA Triwulan 1, 2, 3, 4 Tahun 2021.....	10
<b>Tabel 2.2</b> Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan DP2PA Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021 .....	20
<b>Tabel 2.3</b> Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 .....	38
<b>Tabel 3.1</b> Diagram IPG Provinsi Kaltim 2015-2019.....	50
<b>Tabel 3.2</b> Tabel IDG Provinsi Kaltim 2015-2019 .....	51
<b>Tabel 3.3</b> Tabel IPM Provinsi Kaltim 2015-2019 .....	52
<b>Tabel 4.1</b> Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 .....	55



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota Samarinda dalam menyelenggarakan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Dasar hukum pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan



dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022 yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
8. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking perempuan dan anak);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
13. Peraturan Bersama Tiga Menteri : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men-PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 1/PB/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.



16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Perubahan RPJMD.
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
21. Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 14 Nopember 2020.
22. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ;
23. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial Nomor : 75/HUK/2002 perihal : Pelayanan Terpadu korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
24. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Dan Menteri Sosial Republik Indonesia Dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tentang Penanganan Anak



Berhadapan Dengan Hukum.

- Nomor : 166 A/KMA/SKB/XII/2009
- Nomor : 148 A/A/JA/2009
- Nomor : B/45/XII/2009
- Nomor : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009
- Nomor : 10/PRS-2/KPTS/2009
- Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009

25. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 050-05/563/HK-KS/XII/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021.

### **1.3 Maksud dan tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah untuk memasukkan program dan kegiatan yang merupakan prioritas Perangkat Daerah dan hasil dari musrenbang yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tahun 2022.



#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2021**

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun lalu dan capaian renstra Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA**

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 3.3 Program dan kegiatan



**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK**

**BAB V PENUTUP**



## BAB II

### EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2021

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tahun 2021 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2021, telah memenuhi target yang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, hal ini dapat dilihat dari kinerja tahun anggaran 2021 secara garis besar sudah tercapai dari rencana target yang diharapkan. Tidak tercapainya target maksimal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut ;

- a) Adanya penghematan dan efisiensi dana kegiatan ;
- b) Terdapat beberapa program/kegiatan yang masih belum dapat dilaksanakan padahal sudah diproyeksikan akan tercapai pada pelaksanaan program pembangunan tahun 2021.

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda diprediksi permasalahan yang dihadapi yaitu lambatnya pemutkahiran profil dan data kelurahan yang menggunakan web.

Pada Tabel 2.1 disajikan Realisasi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021 dan realisasi Renja Tahun Berjalan sampai dengan triwulan IV dalam tabel



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pencapaian Renstra SKPD.



**TABEL 2.1**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja-PD**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**  
**Triwulan 1,2 ,3,4 Tahun 2021**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				I		II		III		IV		12=8+9+10+11	13=12/7x100								
				7	8	9	10	11													
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17			
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
2	8	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6,475,959,110		1,009,347,550		1,494,925,385		1,721,665,399		1,877,974,384		6,103,912,718						
2	8	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		98,310,000		29,306,200		2,814,000		6,084,000		34,866,000							
2	8	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen SAKIP	9	Dokumen	98,310,000	3	29,306,200	2	2,814,000	2	6,084,000	2	34,866,000	9	73,070,200	100.00	74.33
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.00	74.33				
Predikat kinerja																ST	S				
2	8	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6,127,712,110		980,041,350		1,429,994,859		1,676,299,845		1,782,861,619	0	5,869,197,673			95.78		
2	8	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	5,479,155,910	3	980,041,350	3	1,201,544,859	3	1,605,349,845	3	1,446,334,675	12	5,233,270,729	100	95.51
2	8	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PTT serta pengelola keuangan dan barang yang dibayarkan honorariumnya	14	Orang	648,556,200	0	-	14	228,450,000	0	70,950,000	0	336,526,944	14	635,926,944	100	98.05
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.00	96.78				
Predikat kinerja																ST	ST				



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

2	8	1	2.1		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			110,000,000	-	58,320,893	36,626,804	14,980,000	109,927,697								
2	8	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2	Jenis	2,500,000	0	-	2	2,500,000	0	-	2	2,500,000	100	100		
2	8	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	Jenis	10,000,000	0	-	0	-	2	10,000,000	0	-	2	10,000,000	100	100
2	8	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis alat tulis kantor	5	Jenis	7,500,000	0	-	2	2,500,000	0	-	3	5,000,000	5	7,500,000	100	100.00
2	8	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau di gandakan	4	Dokumen	15,000,000	0	-	2	6,450,000	0	-	2	8,550,000	4	15,000,000	100	100
2	8	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100	persen	75,000,000	0	-	75	46,870,893	23	26,626,804	2	1,430,000	100	74,927,697	100	99.90
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>														<b>100.00</b>	<b>ST</b>						
<b>Predikat kinerja</b>														<b>ST</b>	<b>ST</b>						
2	8	1	2.1		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		48		85,400,000	-	562,963	296,150	225,680	48	1,084,793	100	1.27				
2	8	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Listrik yang dibayarkan (Tagihan Telepon yang dibayarkan)	48	Bukti Pembayaran	85,400,000	0	-	12	562,963	2	296,150	34	225,680	48	1,084,793	100	1.27
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>														<b>100.00</b>	<b>1.27</b>						
<b>Predikat kinerja</b>														<b>ST</b>	<b>SR</b>						
2	8	1	2.1		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			54,537,000	-	3,232,670	2,358,600	45,041,085	0	50,632,355	#DIV/0!	92.84					
2	8	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100	persen	25,200,000	0	-	25	902,670	25	358,600	50	20,041,085	100	21,302,355	100	84.53
2	8	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung milik sendiri sewa yang dipelihara	100	persen	25,000,000	0	-	25	2,000,000	10	2,000,000	65	21,000,000	100	25,000,000	100	100
2	8	1	2.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	100	persen	4,337,000	0	-	25	330,000	0	-	75	4,000,000	100	4,330,000	100	99.84
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>														<b>100.00</b>	<b>94.79</b>						
<b>Predikat kinerja</b>														<b>ST</b>	<b>ST</b>						
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 1)</b>														<b>100.00</b>	<b>66.79</b>						
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 1)</b>														<b>ST</b>	<b>S</b>						



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

2	8	2			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>			167,710,000		-		9,060,000		1,600,000		128,918,347		139,578,347				
2	8	2	2		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			167,710,000		-		9,060,000		1,600,000		128,918,347	0	139,578,347		83.23		
2	8	2	2	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan	20	Orang	167,710,000	0	-	5	9,060,000	2	1,600,000	13	128,918,347	20	139,578,347	100	83.23	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	100.00	83.23	
																			Predikat kinerja	ST	T	
																			<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 2)</b>	<b>100.00</b>	<b>83.23</b>	
																			<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 2)</b>	<b>ST</b>	<b>T</b>	
2	8	3			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>			1,468,682,000		9,990,000		311,322,944		296,020,389		738,276,107		1,074,720,607				
2	8	3	2		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			1,147,972,000		9,990,000		186,988,700		276,734,900		601,007,007	0	1,074,720,607		93.62		
2	8	3	2	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi pendampingan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100	persen	1,147,972,000	5	9,990,000	20	186,988,700	15	276,734,900	60	601,007,007	100	1,074,720,607	100	93.62	
						Memfasilitasi P2TP2A	100	persen		0	-	25		25		50		100	-	100		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	100.00	93.62	
																			Predikat kinerja	ST	ST	
2	8	3			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN, UPTD PPA</b>			484,831,000		-		-		-		-		-				
2	8	3	2		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			403,206,000		-		-		-		-	0	-		0.00		
2	8	3	2	1	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukanlanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Fasilitasi pendampingan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100	persen	403,206,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00		
2	8	3	3		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kab/kota			81,625,000														
2	8	3	3	2	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Fasilitasi pendampingan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100	persen	81,625,000	0	-	0	-	0	-	100	53,311,000	100	53,311,000	100	65.31	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	100.00	65.31	
																			Predikat kinerja	ST	S	











## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Perencanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan Pelayanan tahun-tahun sebelumnya. sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi Pembangunan ke depan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya.

Dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan Renstra telah menghasikan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pelayanan yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pelayanan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum di daya gunakan secara optimal. Kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Sasaran program kegiatan tahun 2021 telah terlaksana dengan baik meski dengan beberapa catatan untuk perbaikan tahun berikutnya. Analisis terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk SPM ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda memiliki 2 (dua) acuan yaitu ;

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010;



2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan prioritas/acuan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pelayanan melalui tahapan yang sudah ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021 masing-masing bidang melaksanakan kegiatan, yaitu dengan melaksanakan 9 program dan 19 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**1. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

**2. Program Pemenuhan Hak Anak :**

1. Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

**3. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi

**4. Program Perlindungan Perempuan :**

1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.



2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**5. Program Peningkatan Kualitas Keluarga :**

1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

**6. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak :**

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**7. Program Perlindungan Khusus Anak :**

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat daerah Kabupaten/Kota.

**8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat :**

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

**9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah.



**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**  
**Tahun 2016-2021**

No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mengikuti pelatihan PPRG	Orang	OPD	-	-	-	45 org	45 org		-	45 org	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terselenggaranya sosialisasi dan advokasi PUG bagi kepala OPD	Orang	OPD	-	-	-	20 org	20 org		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Fasilitasi pembentukan Focal point kota dan peningkatan kapasitas pokja PUG Kota	dokumen	1	-	-	-	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Evaluasi PUG melalui Anugrah Parahita Ekapraya (APE)	kegiatan	1	-	-	-	1 keg	1 keg		-	1 keg	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Roadshow monev pelaksanaan PUG ke PD	Orang	OPD	-	-	-	46 OPD	46 OPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pengusulam PERDA PUG Kota Samarinda	dokumen	1	-	-	-	1 dok	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Fasilitasi Gender Champion	orang	5	-	-	-	5 org	-		-	3 org	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Peserta sosialisasi perempuan dalam berpolitik	orang		-	-	-	20 org	80 org		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pelatiham bimbingan manajemen usaha bagi perempuan	orang	100	-	-	-	100 org	100 org		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pengembangan sistem permodalan alternatif bagi kelompok usaha	orang	60	-	-	-	60 org	60 org		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	perempuan dengan lembaga keuangan																		
11	Jambore perempuan penggiat usaha ekonomi kreatif	orang	70	-	-	-	70 org	70 org		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pembinaan koperasi perempuan	orang	100		-	-	100 org	100 org		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemutakhiran data PUG dan input SIGA	dokumen	2		-	-	2 dok	2 dok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Advokasi dan fasilitasi PUG Tk.Kecamatan	Orang	10 Kec		-	-	30 org	30 org		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Pembinaan dan penilaian P2WKSS	10 kec	10 kec		-	-	10 kec	10 kec		10 kec	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pelaksanaan kegiatan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)	Unit	2		-	-	2 unit	2 unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Tersedianya dokumen RAD Lansia untuk pengendalian peningkatan jumlah lansia, terjaminnya kualitas hidup lansia, tersedianya data pilah jumlah lansia di Kota Samarinda	dokumen	1		-	-	1 dok	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Memfasilitasi P2TP2A	Bln	12 bln		100%	100%	-	-		100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
19	Jumlah sosialisasi UU No.23 tahun 2004	Kali	-		-	-	4 kali	4 kali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Jumlah sosialisasi UU	Kali	-		-	-	4 kali	4 kali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	No.21 Tahun 2007																		
21	Jumlah tenaga puskesmas yang mengikuti pelatihan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak	Orang	48		-	-	48 org	48 org		-	-	-	-	-	100%	100%			
22	Persentase pendampingan mediasi, pendampingan penyidik, pendampingan bankum, pendampingan psikolog	%	100		100%	100%	100%	100%		100%	100%	-	-	-	100%	100%			
23	Tersedianya dokumen RAD TPPO	dokumen	1		-	-	-	1 dok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Cakupan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	-	100%	100%	100%	100%		100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Cakupan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih mampu tatalaksana Ktp/A dan PPT/PKT di	%	100	-	100%	100%	100%	100%		100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-



	rumah sakit dan puskesmas																		
26	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	-	100%	100%	100%	100%		100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan	%	100	-	100%	100%	100%	100%		100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Jumlah pelatihan pendampingan bagi petugas yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak	kali	1	-	-	-	1 kali	2 kali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Jumlah petugas yang terlatih dalam mengelola data pilah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	orang	100	-	-	25 org	25 org	25 org		-	25 org	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Persentase petugas terlatih dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Persentase pengelola data pilah kasus	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	kekerasan perempuan dan anak yang terlatih																		
32	Rasio KDRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Persentase petugas yang mengikuti pelatihan penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Persentase Komunikasi, informasi dan edukasi dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Koordinasi dan pendampingan kasus kekerasan pada anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Persentase OPD yang menyediakan sarana dan prasarana untuk anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Persentase pencegahan kasus kekerasan pada anak	%	100	-	-	-	100%	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Jumlah personil yang mengikuti pelatihan penanganan kasus terhadap anak	orang	30	-	-	-	10 org	10 org		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Jumlah pelatihan orang tua anak	kali	12	-	-	-	4 kali	4 kali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	berkebutuhan khusus / disabilitas																		
40	Focus Group Discussion (FGD) aktivis PATBM	Kegiatan	10	-	-	-	2 keg	4 keg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Jumlah aktivis PATBM yang mendapatkan pelatihan	Orang	380	-	-	-	100 org	130 org		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Pembentukan PATBM di kelurahan	Kel	69	-	-	-	10	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pengarusutamaan hak anak	kegiatan	18	-	-	-	4 keg	6 keg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Fasilitasi perlindungan anak melalui KPAD	%	100		100%	100%	100%	100%		100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
45	Jumlah tenaga terdidik KHA di puskesmas	orang	55		-	-	55 org	55 org		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Jumlah tenaga terdidik KHA di sekolah	kali	2		-	-	2 kali	2 kali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Terbentuknya forum anak dan pemilihan pengurus FA ditingkat Kota	orang	40		-	-	40 org	40 org		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Terselenggaranya pertemuan forum anak	orang	60		-	-	60 org	60 org		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Fasilitasi kreativitas dan partisipasi anak	orang	6000		-	-	1500 org	2000 org		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Terlaksananya sosialisasi seks edukasi pada orang tua PAUD dan TK	Kegiatan	6		-	-	2 keg	2 keg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Terselenggaranya	Kegiatan	8		-	-	8 keg	8 keg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	advokasi, koordinasi dan FGD kepada PD, lembaga masyarakat, duni a usaha, dan media masa yang terlibat dalam gugus tugas KLA																		
52	Tersedianya penginputan 5 kluster data untuk penilaian dan evaluasi KLA	Kegiatan	1	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg		1 keg	1 keg	1 keg	-	-	-	-	-	-	-
53	Pembinaan kecamatan dan kelurahan layak anak	Kegiatan	9	-	-	-	3 keg	3 keg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Tersedianya RAD KLA, tersedianya pedoman pelaksanaan perlindungan anak, pelaksanaan KLA sesuai dengan RAD menuju Kota Layak Anak	dokumen	1	-	-	-	1 dok	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Tersedianya dokumen RAD Penghapusan bentuk pekerja terburuk anak (PBPTA), tersedianya data jumlah pekerja anak, menghapus pekerja anak di Kota Samarinda	dokumen	1	-	-	-	1 dok	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang rumah aman	Bln	12	-	-	-	12 bln	12 bln		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Tersedianya	Bln	12	-	-	-	12 bln	12 bln		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	operasional rumah aman																		
58	Terlaksananya pembinaan kader PKK dan desa Wisma	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Terfasilitasinya 10 program pokok PKK	%	70 PKK	-	70 PKK	70 PKK	70 PKK	70 PKK		70 PKK	70 PKK	-	-	-	97,12 %	-			
60	Terselenggaranya kegiatan gotong royong masyarakat	%	1 kali	-	-	-	1 kali	1 kali		-	-	-	-	-	-	-			
61	Fasilitasi kegiatan TMMD	%	1 kali	-	-	-	1 kali	-		-	-	-	-	-	-	-			
62	Pembinaan dan pendayagunaan profil kelurahan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang mengikuti bimtek	Orang	120	-	-	-	120 org	120 org		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Jumlah LPM yang dibina	LPM	59	-	-	-	59 LPM	59 LPM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Lomba kelurahan dan evaluasi perkembangan kelurahan	Kec	10	-	-	-	10 kec	10 kec		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Jumlah Posyantek /wartek yang terbentuk	Kel/kec	59/10	-	9	9	-	-		9	9	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Jumlah Posyantek yang dibina	Posyantek	10	-	9	9	-	-		9	9	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Sosialisasi TTG dan gelar/pameran TTG Tingkat	Kali	2	-	-	-	2 kali	2 kali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	nasional																		
69	Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan TTG dan Posyantek	Kali	2	-	-	-	2 kali	2 kali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Sosialisasi TTG dan gelar/pameran Tk nasional dan masyarakat dalam pemanfaatan TTG	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Sosialisasi posyantek dan wartek	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Bukti pembayaran	144	-	-	-	48	48		48	48	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Tersedianya alat tulis kantor	Jenis	5	-	-	-	5	5		5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dokumen	4	-	-	-	4 dok	4 dok		4 dok	4 dok	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Jenis	2	-	-	-	2	2		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	2	-	-	-	2	2		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Terjalannya koordinasi yang baik lintas sektoral dan vertical	Bln	12	-	100%	100%	100%	100%		100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
78	Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran	orang	14	-	-	-	14 org	14 org		-	14 org	-	-	-	100%	100%	-	-	-



79	Tersedianya makanan dan minuman rapat	persen	100	-	-	-	100%	100%		-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Jumlah unit pemeliharaan gedung kantor	Bln	12	-	100%	100%	-	-		100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
81	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Unit	15	-	100%	100%	-	-		100%	-	-	-	-	95,94%		-	-	-
82	Jumlah unit pemeliharaan peralatan kantor	Bln	12	-	100%	100%	-	-		99,83%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
83	Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	orang	52	-	-	-	52 org	52 org		-	52 org	-	-	-	-	-			
84	Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	orang	5	-	-	-	5 org	5 org		-	5 org	-	-	-	-	-			
85	Jumlah dokumen sakip dan laporan	Buku	9	-	9	9	9	9		9	9	-	-	-	100%	100%			
86	Nilai Evaluasi AKIP	A	-	c	b	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Persentase tenaga PPRG terlatih pada seluruh PD								83,51										
88	Jumlah dokumen laporan								1 dok										
89	Jumlah peserta pelatihan PPRG								20 org										
90	Jumlah peserta bimtek politik, hukum, sosial dan ekonomi								75 peserta										



91	Jumlah dokumen laporan								2 dok										
92	Persen tase indeks keluar ga tinggi								10										
93	Jumlah peserta bimtek								330 org										
94	Jumlah dokumen laporan								2 dok										
95	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan								0,0062										
96	Jumlah laporan								1 lap										
97	Jumlah pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan								127										
98	Jumlah laporan								1										
99	Jumlah jenis sarana dan prasarana rumah perlindungan yang terpenuhi								14										



100	Jumlah operasional rumah perlindungan								1 rmh										
101	Persentase data gender dan anak								50%										
102	Jumlah dokumen								1										
103	Jumlah adokumen data gender dan anak terpilah pemerintah kota								1										
104	KLA								700										
105	Jumlah laporan								1										
106	Jumlah sosialisasi dan pelatihan pemenuhan hak anak								2										
107	Jumlah forum anak Tk Kota, Kec dan Tingkat Kelurahan								50										
108	Dokumen KLA								7										
109	Prosentase pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan parapihak lingkup daerah kab/kota								0,095										



110	Jumlah peserta								800										
111	Jumlah aktivis PATBM yang mendapatkan pelatihan								60 org										
112	Persentase kelurahan yang memiliki profil kelurahan berbasis web								38,9										
113	Jumlah kelurahan yang dibina								30										
114	Jumlah profil desa /kelurahan								30										
115	Jumlahkelurahan yang ikut lomba								20										
116	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang aktif								97,20%										
117	Jumlah lembaga kemasyarakatan								893										



118	yang aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina (LPM, PKK, Posyandu)								59										
119	Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek )								10										
120	Jumlah laporan pelaksanaan bulan bakti gotong royong								10										
121	Jumlah laporan pelaksanaan 10 Program PKK								1										
122	IKM								71,00										
123	Nilai AkIP								70,50										
124	Jumlah dokumen perencanaan								3 dok										
125	Jumlah laporan evaluasi								1 dok										
126	Jumlah laporan								28 laporan										
127	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan								38 org										
128	Gaji dan tunjangan Non ASN yang								19 org										



	dibayarkan																		
129	Jumlah laporan								25 dok										
130	Jumlah pegawai								52 org										
131	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya								0										
132	Jumlah ASN yang Diklat								0										
133	Jumlah ASN yang bimtek								0										
134	Jumlah laporan								4										
135	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								3 jenis										
136	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								2 jenis										
137	Jenis bahan logistik								5 jenis										
138	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan								4 laporan										
139	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan								4 jenis										
140	Jumlah SPPD								20 SPPD										
141	Laporan penyediaan jasa								1 lap										
142	Tagihan Rekening yang Dibayarkan								1 bukti pembayaran										
143	Jasa pelayanan								11 org										



	umum kantor yang dibayarkan																		
144	Laporan pemeliharaan							5											
145	Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan							2 bukti pembayaran											
146	Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional							2 bukti pembayaran											
147	Tagihan pemeliharaan peralatan mesin							0											
148	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi gedung							1 bukti pembayaran											
149	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung							1 bukti pembayaran											
150	Laporan rencana kebutuhan barang							4											
151	Jumlah kendaraan perorangan							0											
152	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional							0											
153	Jenis mebel							0											
154	Jumlah peralatan dan mesin							0											



### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.**

Isu-Isu Strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih di hadapi ke depan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikemukakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi identitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Rumusan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang dihasilkan selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah (RPJMD) 2016–2021 sebagai berikut :

1. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di semua OPD.
2. Implementasi permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 12 Tahun 2011 tentang program Pembentukan Kota Layak Anak.
3. Pemutakhiran data kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis jejaring dan Informasi Teknologi mendukung SMART CITY.



## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2021 dirumuskan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.

Setelah disusun rancangan awal RKPD dengan plafond yang telah diberikan ternyata masih ada kekurangan pagu anggaran sesuai dengan analisis kebutuhan pada beberapa kegiatan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021 memuat usulan program dan kegiatan yang terdiri dari 9 program dan 19 kegiatan.

Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2021 dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.





**TABEL 2.3**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023**  
**Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Kota Samarinda

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>IKM</b>		<b>77</b>	<b>8,732,942,000</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>IKM</b>		<b>77</b>	<b>8,732,942,000</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai AKIP</b>			<b>175,000,000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai AKIP</b>			<b>175,000,000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah	Samarinda	5 Dokumen	65,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah	Samarinda	5 Dokumen	65,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	1 Dokumen	20,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	1 Dokumen	20,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Samarinda	1 Dokumen	20,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Samarinda	1 Dokumen	20,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Samarinda	1 Dokumen	20,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Samarinda	1 Dokumen	20,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Samarinda	1 Dokumen	10,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Samarinda	1 Dokumen	10,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Samarinda	1 Laporan	10,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Samarinda	1 Laporan	10,000,000.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	1 Laporan	30,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	1 laporan	30,000,000.00	



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji tunjangan ASN yang dibayarkan	Samarinda	6,933,942,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji tunjangan ASN yang dibayarkan	Samarinda	6,933,942,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Samarinda	40 orang/bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Samarinda	40 orang/bulan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Samarinda	14 Dokumen	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Samarinda	14 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Samarinda	5 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Samarinda	5 Laporan
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pegawai</b>	Samarinda	<b>204,000,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pegawai</b>	Samarinda	<b>204,000,000</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Samarinda	104 Paket	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Samarinda	104 Paket
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Samarinda	10 Orang	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Samarinda	10 Orang
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Samarinda	5 Orang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Samarinda	5 Orang
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan</b>	Samarinda	<b>265,000,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan</b>	Samarinda	<b>265,000,000</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	3 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	3 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	2 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	2 Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Samarinda	5 Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Samarinda	5 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Samarinda	4 Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Samarinda	4 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Samarinda	2 Dokumen	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Samarinda	2 Dokumen
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Samarinda	10 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Samarinda	10 Laporan



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	Samarinda	810,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	Samarinda	810,000,000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Samarinda	2 unit	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Samarinda	2 unit
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Samarinda	3 unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Samarinda	3 unit
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Samarinda	4 unit	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Samarinda	4 unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Samarinda	1 unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Samarinda	1 unit
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan Penyediaan Jasa Kantor</b>	Samarinda	<b>160,000,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan Penyediaan Jasa Kantor</b>	Samarinda	<b>160,000,000</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Samarinda	3 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Samarinda	3 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Samarinda	11 Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Samarinda	11 Laporan
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan Pemeliharaan</b>	Samarinda	<b>185,000,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan Pemeliharaan</b>	Samarinda	<b>185,000,000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan bayar pajaknya	Samarinda	13 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan bayar pajaknya	Samarinda	13 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Samarinda	2 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Samarinda	2 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Samarinda	33 Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Samarinda	33 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Samarinda	1 Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Samarinda	1 Unit



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase tenaga PPRG terlatih pada seluruh PD	Samarinda		971,382,000	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase tenaga PPRG terlatih pada seluruh PD	Samarinda		971,382,000
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan	Samarinda		850,000,000	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan	Samarinda		850,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	3 Dokumen	250,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	3 Dokumen	250,000,000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengiuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pengarus Utama Gender (PUG) termasuk perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	51 PD	600,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengiuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pengarus Utama Gender (PUG) termasuk perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	51 PD	600,000,000
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek Politik, Hukum, sosial dan Ekonomi	Samarinda		121,382,000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek Politik, Hukum, sosial dan Ekonomi	Samarinda		121,382,000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	25 Organisasi	121,382,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	25 Organisasi	121,382,000



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

3	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Samarinda		613,250,000	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Samarinda		613,250,000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Samarinda		330,000,000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Samarinda		330,000,000
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota Yang mendapatkan layanan pengaduan	Samarinda	150 Orang	330,000,000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota Yang mendapatkan layanan pengaduan	Samarinda	150 Orang	330,000,000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	Samarinda		283,250,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	Samarinda		283,250,000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	4 laporan	51,500,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	4 laporan	51,500,000
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Samarinda	700 Orang	231,750,000	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Samarinda	700 Orang	231,750,000



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

4	<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	Persentase Indeks keluarga Tinggi	Samarinda	14	650,000,000	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Indeks keluarga Tinggi	Samarinda	14	650,000,000	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah kabupaten/Kota	Jumlah peserta Bimtek	Samarinda			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah kabupaten/Kota	Jumlah peserta Bimtek	Samarinda		
		Advokasi Kebijakan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Samarinda	8 Lembaga	500,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Samarinda	8 Lembaga	500,000,000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia LayananPeningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	100 Orang	150,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia LayananPeningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	100 Orang	150,000,000
5	<b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</b>	persentase data gender dan anak	Samarinda	79%	300,000,000	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	persentase data gender dan anak	Samarinda	79%	300,000,000	
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase data gender dan anak	Samarinda	79	300,000,000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase data gender dan anak	Samarinda	79	300,000,000
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Samarinda	4 Dokumen	300,000,000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Samarinda	4 Dokumen	300,000,000



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	KLA	Samarinda	700 s/d 800	1,100,000,000	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	KLA	Samarinda	700 s/d 800	1,100,000,000
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen KLA	Samarinda	7	500,000,000	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen KLA	Samarinda	7	500,000,000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Samarinda	30 Organisasi	100,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Samarinda	30 Organisasi	100,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	8 Dokumen	400,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	8 Dokumen	400,000,000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	Samarinda	1 laporan	600,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	Samarinda	1 laporan	600,000,000
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	110 Orang	150,000,000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	110 Orang	150,000,000
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	3 Dokumen	200,000,000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	3 Dokumen	200,000,000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	3 Dokumen	250,000,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	3 Dokumen	250,000,000



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

7	Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan Paraphak lingkup Daerah Kab./Kota	Samarinda	0,157%	300,000,000	Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan Paraphak lingkup Daerah Kab./Kota	Samarinda	0,157%	300,000,000
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta	Samarinda	1400		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta	Samarinda	1400	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	3 Dokumen	200,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	3 Dokumen	200,000,000
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivis PATBM yang mendapatkan pelatihan	Samarinda	90		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivis PATBM yang mendapatkan pelatihan	Samarinda	90	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	2 Dokumen	100,000,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	2 Dokumen	100,000,000
					500,000,000					500,000,000
	Program Perlindungan Perempuan (UPTD)	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPD per 100.000 penduduk perempuan	Samarinda		350,000,000	Program Perlindungan Perempuan (UPTD)	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPD per 100.000 penduduk perempuan	Samarinda		350,000,000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Samarinda	1 Laporan		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Samarinda	1 Laporan	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Samarinda	170 Orang	350,000,000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Samarinda	170 Orang	350,000,000
	Program Perlindungan Khusus Anak (UPTD)	Rasio Kekerasan terhadap anak per 100.000 penduduk anak	Samarinda	0,157%	150,000,000	Program Perlindungan Khusus Anak (UPTD)	Rasio Kekerasan terhadap anak per 100.000 penduduk anak	Samarinda	0,157%	150,000,000
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak	Samarinda	110 Anak		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak	Samarinda	110 Anak	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	110 Orang	150,000,000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	110 Orang	150,000,000
					13,167,574,000					





## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Usulan program dan kegiatan Tahun 2022 bersumber dari usulan masyarakat berdasarkan hasil musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota diperoleh beberapa kegiatan program yang memerlukan dukungan anggaran yang berasal dari usulan pemangku Advokasi konseling KDRT melalui P2TP2A, Peringatan Hari Ibu (PHI) dan Peringatan Hari Anak Nasional.

Banyaknya usulan program dan kegiatan para pemangku kepentingan yang diusulkan dalam musrenbang ternyata tidak diimbangi dengan anggaran yang diberikan, sehingga perlu ditentukan prioritas hasil musrenbang yang dapat diakomodir. setelah dilakukan pembahasan maka dari usulan tersebut ada beberapa yang dapat diakomodir disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran, dan sebagian usulan diarahkan ke OPD lain sesuai dengan tugas dan fungsi instansi terkait.



### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Penyusunan Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar Tingkat Pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya Pembangunan Daerah. Disamping itu Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2022 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, tugas pokok dan fungsi kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Terkait dengan Peraturan Pemerintah tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) PBB, salah satu indikator kesejahteraan Negara adalah kesetaraan gender. Negara belum dikatakan maju bila perempuan dan anak belum berada di ranah aman. Dalam banyak hal perempuan di Indonesia telah mencapai kemajuan pesat, meskipun hambatan utama menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya meningkatnya keadilan gender merupakan hal yang secara



ekonomi masuk akal. Mengharusutamakan masalah gender ke dalam inisiatif, strategi, kebijakan, sasaran dan target pembangunan memerlukan pengertian menyeluruh atas konteks dinamika Gender.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda harus memberikan kontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2021-2026, dengan mendukung peningkatan pencapaian hasil salah satu program unggulan yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Program Three Ends, Program 3 *End* meliputi *End Violence Against Woman And Children* (akhiri kekerasan pada wanita dan anak), *End Human Trafficking* (akhiri perdagangan manusia), *End Barriers to Economic Justice* (akhiri kesenjangan ekonomi), dengan mengadakan sosialisasi, penanganan kasus korban kekerasan dengan konseling serta rumah aman. Juga menekankan perlunya peran media massa dalam mendukung isu responsif gender dan memahami tentang hak anak.

Media massa dapat menjadi mitra pemerintah untuk mengedukasi masyarakat dan menjalankan pemberitaan terkait perempuan dan anak yang berimbang. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan program Three Ends ini yaitu :

#### 1. Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- Informasi hak perempuan dan anak menjangkau seluruh masyarakat
- Berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak
- Berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah
- Dukungan yang massif dari pemangku kepentingan (K/L, Pemda, Lembaga Masyarakat)



## 2. Akhiri Perdagangan Manusia

- Terbangunnya sistem deteksi anti perdagangan manusia (perempuan dan anak)
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem deteksi anti perdagangan manusia
- Terbangunnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus perdagangan manusia melalui Gugus Tugas TPPO
- Memastikan setiap calon TKW mendapatkan pelatihan yang memadai

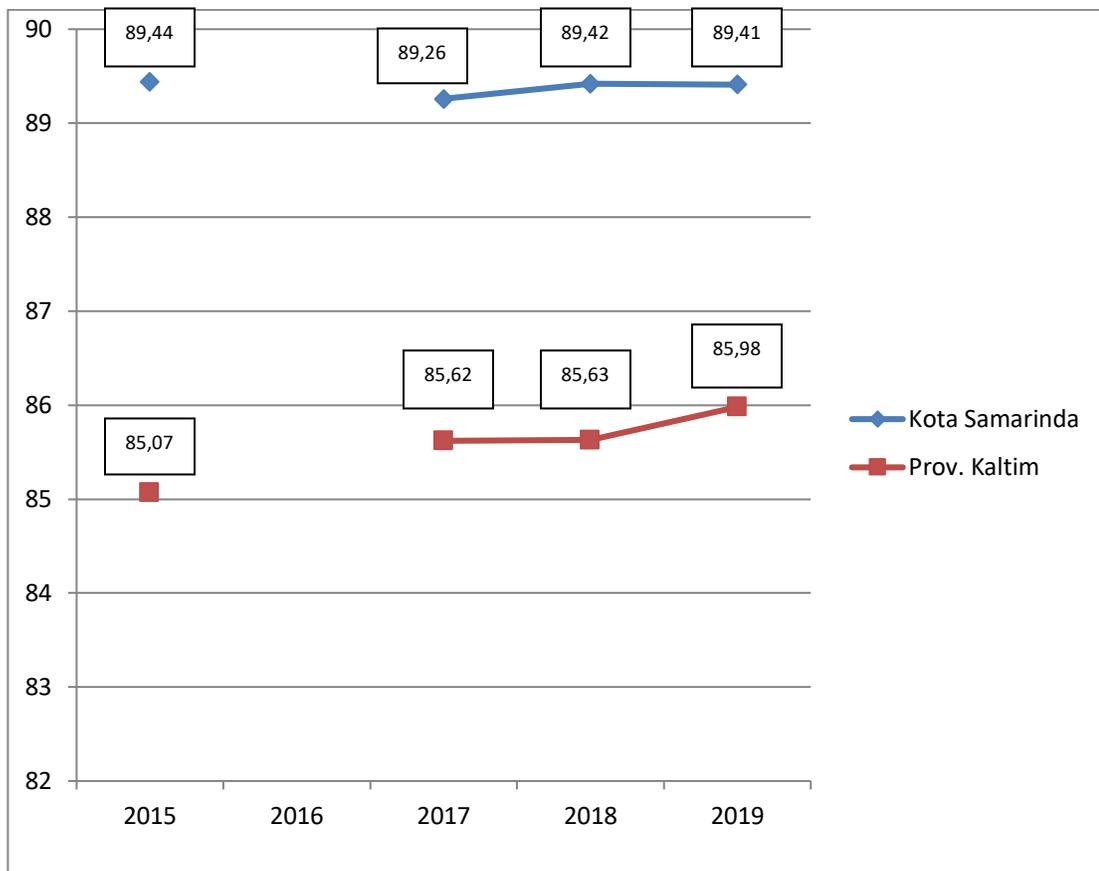
## 3. Akhiri Kesenjangan Ekonomi

- Memastikan K/L terkait menjalankan program pelatihan bagi perempuan pelaku usaha
- Memastikan setiap perempuan berhak mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan
- Menyiapkan sistem permodalan alternative bagi perempuan pelaku usaha mikro
- Mengembangkan dukungan dana / sarana alternatif bagi perempuan inovator .

Akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan dan akses ekonomi yang semakin baik terbukti dengan pencapaian IPG yang semakin baik dan meningkat setiap tahun. Berikut dapat dilihat pencapaian IPG , IDG dan IPM Kalimantan Timur dibawah ini :



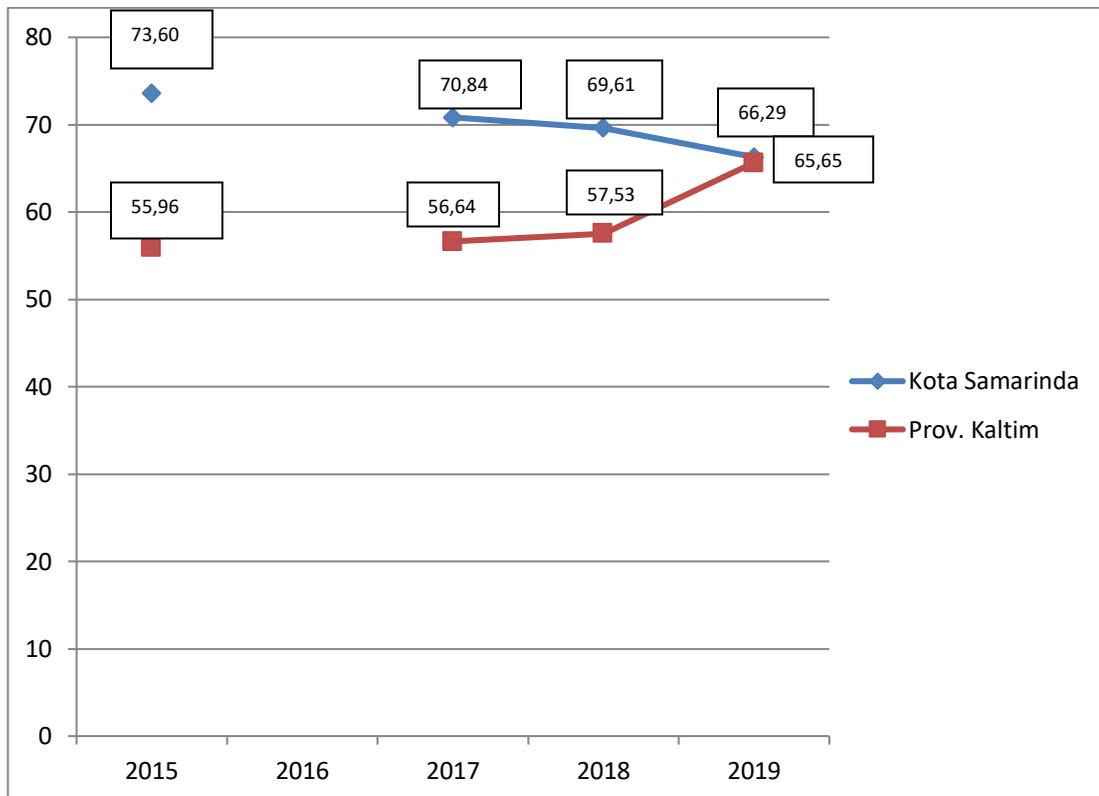
Tabel 3.1  
Diagram IPG Tahun 2015-2019



Dilihat capaian IPG Kota Samarinda lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut membuktikan bahwa pembentuk dari IPG yang berupa angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita mendukung kenaikan dari nilai IPG tersebut. Namun demikian terjadi pluktuasi penurunan dan kenaikan pada tahun-tahun berikutnya dimana terjadi penurunan sebesar 0,18 dari 89,44 menjadi 89,26 pada tahun 2017, dan kenaikan sebesar 0,16 dari 89,26 menjadi 89,42 pada tahun 2018, dan penurunan sebesar 0,01 dari 89,42 menjadi 89,41 pada tahun 2019.



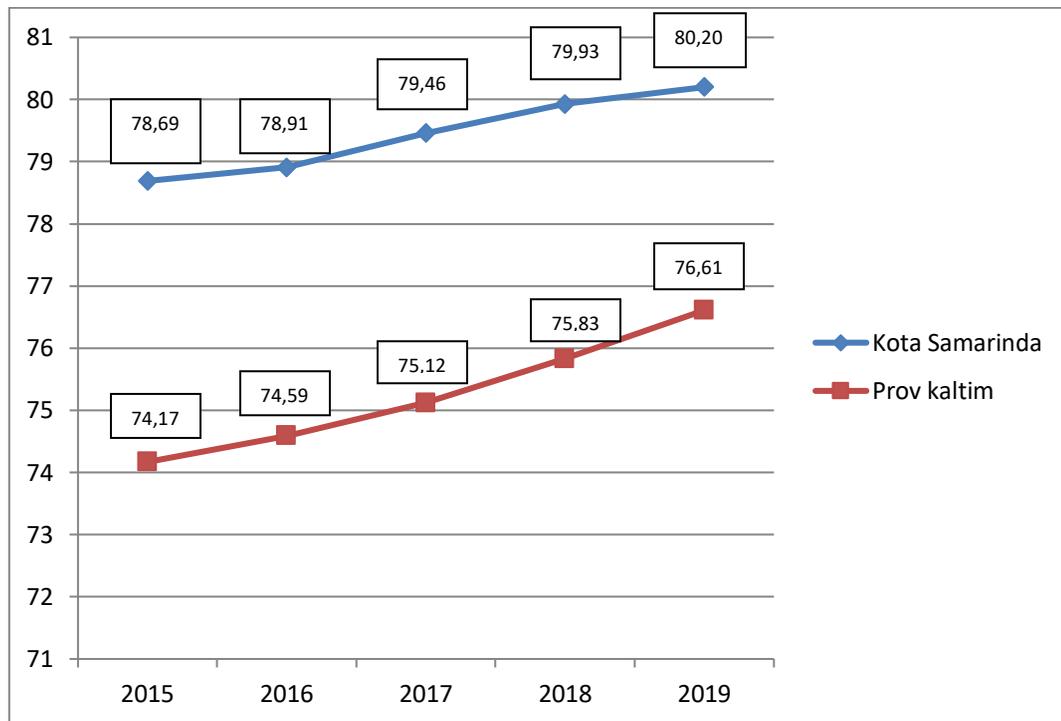
Tabel 3.2  
Diagram IDG Tahun 2015-2019



Capaian IDG Kota Samarinda cukup baik, pada tahun 2015 hingga 2019 sudah berada di atas IDG Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Samarinda cukup tinggi.



Tabel 3.3  
Diagram IPM Tahun 2015-2019



### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda telah menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender;
2. Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda juga ditentukan dengan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai, yaitu ;

1. Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan;



2. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD.

### **3.3 Program dan Kegiatan.**

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari sekretariat dan 4 bidang pada rencana kinerja tahun 2022 terdiri 8 program dan 15 kegiatan adalah :

#### **1. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota.

#### **2. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

#### **3. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**

- Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

#### **4. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**

- Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

#### **5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

#### **6. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



## **7. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

## **8. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN ( UPTD )**

- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD****4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD**

Berikut kami lampirkan tabel Rencana Kerja dan pendanaan SKPD Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2023 sebagai berikut :

**TABEL 4.1**  
**Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	
	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	850.000.000
	2. Pemberdayaan Perempuan Bidang politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	121.382.000
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	
	1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	330.000.000
	2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	283.250.000
	3. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD)	350.000.000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	
	1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	650.000.000
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	300.000.000
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	
	1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	400.000.000
	2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	600.000.000
<b>6</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	
	1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
	2. Penyediaan Layanan bagi anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
	3. Penyediaan Layanan bagi anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)	150.000.000
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.000.000
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000
	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000



	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000
	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000
	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.166.697.000
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	717.245.000
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000
	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	104.000.000
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000
	3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000
	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000
	3. Penyediaan Bahan logistik Kantor	10.000.000
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000
	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.000
	2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000
	3. Pengadaan Mebel	50.000.000
	4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000
	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000
	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000
	Jumlah	<b>13.067.574.000</b>



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2022 disusun sebagai penjabaran dari perubahan RPJMD Kota Samarinda dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, selama tahun 2022 telah tercermin dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tahun 2022 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan Program kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama satu tahun anggaran serta merupakan implementasi tentang RENJA di tahun berikutnya.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ini, telah dapat menggambarkan segala upaya yang telah dilakukan dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Namun masih dibutuhkan kerja keras dari semua pihak dengan melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan pada tahun mendatang, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya dengan terus menerus melakukan evaluasi, monitoring dan inovasi sehingga dapat tercipta kinerja yang lebih baik.